

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, memiliki garis pantai sepanjang 90.000 kilometer. Karakteristik geografis ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan negara maritim dengan potensi serta potensi pariwisata yang besar. Pariwisata merupakan Agenda Nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), hal ini tercantum dalam 5 arahan utama Presiden pada strategi pembangunan infrastruktur serta transformasi ekonomi. 5 arahan utama Presiden dalam RPJMN diantaranya pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Jasa dan Pariwisata termasuk ke dalam strategi pembangunan infrastruktur ekonomi dan strategi dalam poin transformasi ekonomi ialah pengembangan destinasi unggulan melalui perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenities di destinasi pariwisata prioritas.



Sumber : *RPJMN (2020-2024)*

Gambar 1. 1 5 Arahan Presiden dalam Pembangunan Infrastruktur

Pencapaian pembangunan kepariwisataan yang efektif dan berkelanjutan secara fundamental didasarkan pada mekanisme pengelolaan sektor publik yang solid, yang diwujudkan melalui kualitas administrasi publik dan manajemen publik yang adaptif. Menurut Harbani Pasolong (2010), administrasi publik adalah kerjasama antara sekelompok orang maupun lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Ini berarti pengelolaan sektor publik seperti pariwisata memerlukan kolaborasi erat dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Lebih lanjut, manajemen publik, menurut Overman dalam Keban (2014: 92), merupakan ilmu interdisipliner yang mencakup elemen-elemen organisasi atau lembaga secara umum, serta kolaborasi berbagai fungsi manajemen seperti POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), yang melibatkan unsur-unsur manusia, keuangan, informasi, dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata tidak hanya berfokus pada aspek administratif, melainkan juga melibatkan berbagai

faktor dinamis yang memengaruhi pengelolaan organisasi dalam konteks pemerintahan.

Dalam aspek ekonomi, sektor pariwisata dapat memberikan multiplier effect. Menurut Blanchard (2003), multiplier effect yakni efek dalam ekonomi di mana terdapat perubahan investasi awal yang memberikan efek ganda pada pendapatan nasional yang diakibatkan oleh reaksi berantai dalam konsumsi dan investasi tambahan. Dalam konteks pariwisata, pariwisata disinyali dapat mendorong pertumbuhan sektor lain seperti transportasi, akomodasi, perdagangan, dan UMKM. Pariwisata termasuk kedalam sektor padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja lebih, baik dalam bidang jasa wisata, maupun melalui usaha pendukung. *Poin multiplier effect* menggambarkan bagaimana pengeluaran oleh wisatawan seperti biaya akomodasi, transportasi, serta kuliner dapat memberikan manfaat ekonomi tambahan, oleh karena itu pariwisata disinyali dapat memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dengan potensi kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pariwisata memiliki keunikan dalam efek penyebaran ekonominya (multiplier effect). Pariwisata mendorong banyak sektor lain seperti transportasi, perhotelan, makanan dan minuman, hingga seni dan budaya. Selain itu, sektor ini sangat strategis untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan devisa negara.

Berdasarkan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 Kota Semarang secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah, dan perbukitan. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara yang berbatasan dengan Laut Jawa.

Dataran rendah merupakan Kawasan di bagian Semarang Tengah, dan daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Semarang Selatan dengan kemiringan antara 15-40% dan beberapa Kawasan memiliki kemiringan diatas 40%. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, beberapa perbukitan yang dimanfaatkan dan dikembangkan oleh kota Semarang sebagai objek wisata diantara lain Brown Canyon meteseh, Gunung, Talang, dan Taman Tabanas Semarang.

Terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) *Kota Semarang 2021–2026* dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota (RIPPARKOT) Kedua dokumen ini memuat berbagai strategi yang saling mendukung dalam upaya pengembangan pariwisata Kota Semarang. Strategi-strategi tersebut antara lain:

1. Strategi 4: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.
Strategi ini menekankan vitalnya peran aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui kebijakan yang mendorong keterlibatan warga dan pemuda demi tercapainya pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
2. Strategi 8: Pemberdayaan Ekonomi Lokal.
Penguatan ekonomi lokal memandang penguatan ekonomi lokal sebagai fondasi iklim ekonomi daerah yang sehat, dengan harapan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memicu pertumbuhan aktivitas usaha.

3. **Strategi 11: Peningkatan Daya Saing Pariwisata.** yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan daya saing sektor pariwisata secara menyeluruh, mengingat Kota Semarang memiliki potensi besar dari aspek alam, budaya. Oleh karena itu, strategi ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan dan daya saing sektor pariwisata secara menyeluruh. Meskipun Bukit Senja belum berstatus resmi sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW), kawasan ini tetap selaras dengan Strategi 11 melalui pendekatan penguatan daya saing wisata, serta Arah Kebijakan 21 yang secara spesifik berfokus pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat."

Selain itu, RIPPARKOT *Kota Semarang* juga memuat kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata. Pasal 25 menjabarkan bahwa arah kebijakan tersebut bertujuan untuk:

1. Mengembangkan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan
2. Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat;
3. Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Sapta Pesona guna menciptakan iklim pariwisata yang kondusif.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan prinsip desentralisasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan

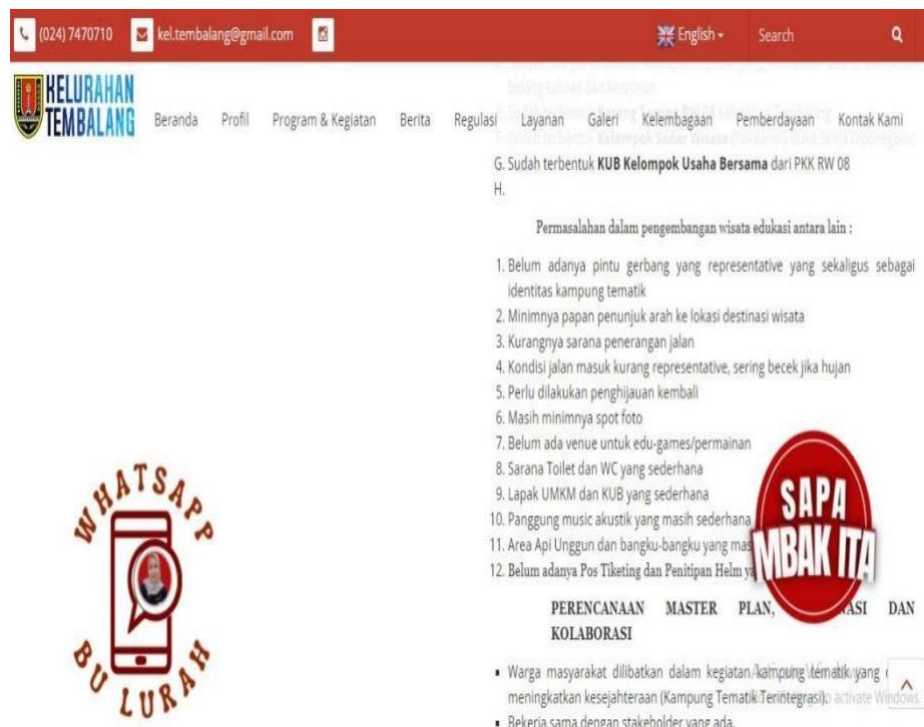
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk dalam pengelolaan sektor pariwisata. Hal ini memberikan pemerintah daerah tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengelola potensi wisata lokal yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Melalui kewenangan ini, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan strategis, membangun infrastruktur pendukung pariwisata, serta memberdayakan masyarakat lokal melalui kelompok seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Sejalan dengan prinsip tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan lebih lanjut mengamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan memerlukan koordinasi strategis lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan untuk meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan secara menyeluruh. Sementara itu, UU No. 32 Tahun 2004, sebagai landasan awal sebelum UU No. 23 Tahun 2014, juga menekankan pentingnya tata kelola yang efektif di tingkat daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Sebagai implementasi nyata dari arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah membina dan mengakui keberadaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di berbagai wilayah. Hingga saat ini, Kota Semarang telah memiliki 59 Pokdarwis yang tersebar, menunjukkan komitmen dalam pemberdayaan komunitas pariwisata. Lebih spesifik lagi, di Kecamatan Tembalang terdapat 3 Pokdarwis, dan di Kelurahan Tembalang sendiri teridentifikasi 1 Pokdarwis, yaitu Pokdarwis di Bukit Senja Diponegoro. Keberadaan Pokdarwis ini diperkuat dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 13/411/536/II yang secara resmi

menetapkan pembentukan Pokdarwis “Bukit Senja Diponegoro” di Kelurahan Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. SK ini merupakan bentuk pelimpahan kewenangan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan objek wisata, sekaligus sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan pariwisata dan mengembangkan potensi lokal Kelurahan Tembalang.

Bukit Senja Diponegoro sendiri merupakan salah satu objek wisata di Kota Semarang yang berlokasi strategis di dalam permukiman warga, tepatnya di perumahan Bukit Diponegoro, wilayah RW 08. Bukit Senja Diponegoro merupakan lahan milik PT. Karya Usaha Baru, PT. Waskita Karya dan TNI AD yang terbengkalai dan tidak terpakai yang dilestarikan oleh masyarakat setempat untuk fungsi kelestarian, kebersihan dan keamanan yang awalnya terbentuk dari inisiatif warga sekitar dan Karang Taruna ini bermula dari pemanfaatan lahan kosong terbengkalai, yang kemudian dikembangkan menjadi Wisata Edukasi Bukit Senja Diponegoro. Potensi utama yang dimiliki kawasan ini meliputi terdapatnya pokdarwis sebagai Pengelola Bukit Senja, letak bukit senja yang dikelilingi oleh beragam perguruan tinggi yakni Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Universitas Katolik Soegijapranata, Politeknik Kesehatan Semarang, dan Universitas Pandanaran, atraksi berupa wisata alam yang asri yang berkontur dari ketinggian, Keberagaman UMKM RW 08 kelurahan tembalang serta aktifnya Karang Taruna RW 08 Kelurahan Tembalang;

Namun di tengah potensi yang begitu besar tidak semua destinasi wisata di Indonesia terutama yang berbasis masyarakat, berhasil berkembang secara optimal. Salah satu contohnya adalah Bukit Senja Diponegoro di Kota Semarang, yang menghadapi sejumlah kendala dalam pengembangan pariwisata. Dilansir dari *website* Kelurahan Tembalang yang mencakup laporan pengaduan dari SAPA MBAK ITA, terdapat keluhan yakni minimnya papan petunjuk arah ke lokasi destinasi wisata, kurangnya sarana penerangan jalan, infrastruktur jalan yang buruk, kondisi jalanan yang becek, perlu dilakukan penghijauan, spot foto yang kurang, toilet umum yang buruk, lapak UMKM dan KUB, fasilitas yang kurang memadai dan belum adanya pos ticketing dan penitipan helm.



Sumber : Website Kelurahan Tembalang, 2025

Gambar 1.2 Keluhan Permasalahan Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang

Permasalahan di Bukit Senja Diponegoro, Kota Semarang, tidak hanya terungkap melalui website pengaduan, tetapi juga seringkali disuarakan oleh masyarakat di media sosial X. Akun seperti @UndipMenfess (dengan 282.7 ribu pengikut) menjadi kanal utama bagi keluhan tentang insiden kehilangan, kondisi infrastruktur dan sarana prasarana yang belum memadai, serta informasi operasional yang kurang transparan



Sumber : X (2022-2025)

Gambar 1.3 Aduan Masyarakat Terkait Permasalahan Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang

Keluhan-keluhan tersebut mengindikasikan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap tata kelola dan pelayanan di Bukit Senja Diponegoro, yang dapat menjadi indikator kurangnya kejelasan informasi publik, serta kebutuhan perbaikan pada aspek keamanan dan infrastruktur penunjang wisata.

Keluhan masyarakat di atas juga diperkuat dengan adanya dokumentasi lapangan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat kondisi yang ada secara langsung. Beberapa indikasi masalah yang ditemukan oleh penulis berdasarkan observasi penulis dan keluhan yang berada di website kelurahan tembalang dan *twitter* yakni :

1. Minim dan kurang representatifnya papan petunjuk arah menuju lokasi destinasi, kurangnya sarana penerangan jalan, serta kondisi infrastruktur jalan yang kurang layak



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

Gambar 1.4 Gerbang Masuk Bukit Senja Diponegoro



Sumber : *Dokumentasi Peneliti, 2025*
Gambar 1.5. Akses Jalan Masuk Berbatu Bukit Senja Diponegoro



Sumber : *Dokumentasi Peneliti, 2025*
Gambar 1.6 Penerangan Minim Bukit Senja Diponegoro

2. Kondisi lapak UMKM) yang cenderung kurang layak dan bahkan ada yang terlihat rapuh, serta fasilitas toilet umum yang sederhana dan belum memadai.



Sumber : *Dokumentasi Peneliti, 2025*

Gambar 1.7 Lapak UMKM yang Kurang Layak Bukit Senja Diponegoro

3. Kurangnya kejelasan informasi operasional meskipun telah memiliki akun media sosial Instagram

Berdasarkan informasi yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pada Bukit Senja Diponegoro melalui keluhan yang tertera di media sosial dan *website* pengaduan, terdapat dugaan permasalahan dari peneliti terkait kurangnya sinergi antar aktor serta minimnya kerja sama lintas sektor dalam pengelolaan Bukit Senja Diponegoro, atau kurang pahamnya. Pokdarwis mengenai mekanisme kerja sama lintas sektor yang diamanatkan dalam pembangunan pariwisata. Selain itu, partisipasi sektor swasta juga diduga belum dioptimalkan, padahal keterlibatannya merupakan bagian dari

prinsip tata kelola (*governance*) destinasi pariwisata yang inklusif. Menurut UNWTO (2007) dan diperkuat oleh Mardiasmo (2009), tata kelola pariwisata yang baik melibatkan tiga pilar utama, yakni pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Keterlibatan sektor swasta diyakini berperan penting dalam peningkatan kualitas atraksi, fasilitas, serta dukungan investasi jangka panjang bagi pengembangan destinasi yang berpotensi.

Di sisi lain, meskipun telah terdapat sebuah kafe di area Bukit Senja, kegiatan ekonomi masyarakat melalui UMKM belum dioptimalkan. Hal ini tercermin dari keberadaan lapak UMKM yang dibangun 8 unit, namun terhitung september 2025 hanya tersisa dua yang masih beroperasi. Situasi ini mengindikasikan bahwa Bukit Senja Diponegoro belum tercatat memberikan kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang diduga menjadi salah satu alasan belum optimalnya perhatian atau prioritas dari pemerintah daerah terhadap pengembangannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dampak ekonomi dari pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar belum berjalan secara optimal. Padahal, dalam teori *multiplier effect* yang dikemukakan oleh Blanchard (2003), disebutkan bahwa investasi awal di suatu sektor, termasuk pariwisata, seharusnya memberikan efek ganda terhadap peningkatan pendapatan melalui reaksi berantai berupa peningkatan konsumsi dan investasi tambahan. Minimnya perputaran ekonomi yang optimal ini berpotensi menurunkan motivasi pelaku UMKM dan menghambat dukungan masyarakat terhadap pengembangan destinasi secara berkelanjutan.

Mengingat berbagai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, didukung oleh data dan fakta yang ada, serta potensi Bukit Senja Diponegoro yang belum teroptimalkan, peneliti mengidentifikasi adanya celah riset. Belum terdapat penelitian terdahulu yang secara spesifik mengkaji lokus Bukit Senja Diponegoro, Tembalang, Kota Semarang, meskipun kawasan ini menyimpan potensi yang beragam namun disertai tantangan pengembangan. Oleh karena itu, untuk menindaklanjuti dan mengkaji lebih mendalam dinamika pengembangan pariwisata di Bukit Senja Diponegoro, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang”. Penelitian ini akan berupaya menjawab pertanyaan “Mengapa Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang belum maksimal”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pengembangan komponen pariwisata (aksesibilitas dan amenitas) di Bukit Senja Diponegoro terindikasi memiliki keterbatasan ditinjau dari kondisi fisik dan fasilitas destinasi.
2. Dugaan kurangnya sinergi dan kolaborasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan potensi lintas sektor
3. Dampak ekonomi pariwisata yang belum memberikan kontribusi retribusi bagi daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengembangan pariwisata di Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata di Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengembangan pariwisata di Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis, praktis dan akademis sehingga penelitian yang telah dilakukan tidak akan sia-sia. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki fungsi untuk memberikan wawasan pengetahuan dan menjadi bahan literatur atau landasan pengetahuan untuk

penelitian berikutnya tentang Pengembangan Pariwisata Bukit Senja
Diponegoro Kota Semarang

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti :

Penelitian ini disusun untuk mengasah atau mempraktekkan ilmu yang didapat dari mata kuliah yang telah didapatkan dibangku kuliah.

b. Bagi Instansi :

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berasal dari pihak eksternal kepada pihak internal dalam pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang.

c. Bagi Pembaca :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan maupun referensi terkait Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang dalam meningkatkan potensi perekonomian lokal ditingkat masyarakat.

3. Manfaat akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi atau referensi untuk melakukan peneliti berikutnya yang tertarik meneliti tentang Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL, PENELITI (TAHUN)	METODE	TEORI	HASIL
1	Pengembangan Pariwisata Halal di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau Riska Destiana, Kismartini (2020)	Kualitatif Deskriptif	Kriteria evaluasi berdasarkan Patton dan Sawicki (1989), yaitu kelayakan teknis, kelayakan ekonomi dan finansial, kelayakan politis, serta kelayakan administratif	Pelaksanaan perencanaan pembangunan (bottom-up planning) D Wisata Nongkosawit pada tingkat Musrenbang Kelurahan Nongkosa menghasilkan 7 usulan paling prioritas untuk perencanaan pembangu Desa Wisata Nongkosawit, yaitu rehab kantor kelurahan, pengera sayap jalan, pengaspalan jalan, pavingisasi, perbaikan saluran pelatihan membatik dan pelatihan pemandu wisata.
2	Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Kabupaten Toba Samosir. Siregar, R. A., Wiranegara, H. W., & Hermantoro, H. (2018).	Kuantitatif	Pengembangan pariwisata berdasarkan konsep 4A dari Medlik (1980): <i>attractiveness</i> , <i>accessibility</i> , <i>amenities</i> , dan <i>ancillary</i> .	Aksesibilitas dan dukungan sosial masyarakat teridentifikasi sebagai a yang paling lemah dalam pengembangan kawasan Danau Toba. Oleh k itu, diperlukan perbaikan signifikan dalam hal prasarana dan sa termasuk fasilitas pendukung pariwisata seperti tempat sampah, t restoran, tempat parkir, toko cinderamata, dan tempat penginapan, u meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan.
3	Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020).	Kualitatif Deskriptif	Menurut Sugiana (2014), komponen kepariwisataan terdiri dari 4A: <i>Attraction</i> , <i>Amenities</i> , <i>Ancillary</i> , dan <i>Accessibility</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan atraksi di Desa Wis Wonolopo belum optimal karena kurangnya partisipasi masyara setempat. Masyarakat merasa tidak mendapatkan manfaat dari desa wis tersebut, sehingga menunjukkan ketidakpedulian terhadap pengemban pariwisata di desa mereka
4	Pengembangan Pariwisata di Kota Tomohon. Motoh, F. G., Laloma, A., & Londa, V. (2021). <i>Jurnal Administrasi Publik</i> , 7(99).	Kualitatif Deskriptif	Pengembangan pariwisata berdasarkan unsur-unsur yang diidentifikasi oleh Kurniawan (2015): atraksi, transportasi, akomodasi, dan fasilitas pelayanan	Masih diperlukan pengembangan lebih lanjut termasuk penerapan C Transportasi sudah memadai dengan adanya taksi online dan kend pribadi, dan akan ditingkatkan melalui kerjasama dengan ASITA dan Namun, akomodasi masih kurang meskipun sudah ada hotel berbin Fasilitas layanan sudah cukup baik, tetapi memerlukan pengembangan lanjut. Infrastruktur juga sudah memadai dan terus diperhatikan pemerintah untuk kenyamanan pengunjung
5	Analisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan atraksi wisata air mancur Sri Baduga.	Kualitatif Deskriptif	Menurut Riyadi dan Bratakusumah dalam Kawengian dkk (2018) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata harus memperhatikan lima faktor, yang antara lain: 1) Faktor Lingkungan; 2)	Pengelolaan Taman Air Mancur Sri Baduga didukung oleh daya tar i mancur, budaya Sunda, dan promosi media sosial, namun terhambat fasilitas yang kurang terawat, masalah sumber air, dan pendanaan bergantung pada APBD. Rencana pengalihan pengelolaan ke pihak k

	Nur Alfi Syahrin, M., & Sukaesih Kurniati, P. (2020)		Sumber daya Manusia; 3) Sistem yang digunakan; 4) Perkembangan ilmu dan teknologi; 5) dan Faktor Pendanaan. Dengan demikian suksesnya sebuah pembangunan pariwisata terdiri dari beberapa	dan penerapan retribusi sedang diupayakan untuk mengatasi masalah pendanaan ini.
6	Pengembangan Desa Wisata Molinow Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Lamia, K. A. I., Rares, J., & Tulusan, F. (2023).	Kualitatif Deskriptif	Konsep pengembangan pariwisata menurut Yoeti (1997), yang meliputi transportasi, atraksi, fasilitas pelayanan, serta informasi dan promosi	Desa Wisata Molinow memiliki berbagai potensi seperti pantai hitam, atraksi budaya, kuliner, dan wisata pertanian. Namun pengembangannya belum maksimal karena kurangnya kreativitas berkurangnya atraksi budaya, minimnya fasilitas, dan kurang promosi, sehingga jumlah pengunjung masih sedikit. Hal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wisata dan membuka peluang usaha. Tanpa pengembangan yang baik, desa ini tidak akan memberikan kontribusi positif. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengembangan yang baik untuk memaksimalkan potensi besar wisata Molinow di Sulawesi Utara
7	Management Of The 4 A's Of Tourism: Addressing Shortcomings And Enhancing Services In Gebong Memarong Traditional Village Marwani, I. S., Pusparini, M., Lestari, Z. A., Sabri, F., & Usman, A. (2023).	Kualitatif Deskriptif	Mengidentifikasi langkah-langkah pengembangan pariwisata berdasarkan konsep 4A dari Medlik (1980): <i>attractiveness, accessibility, amenities, dan ancillary</i> .	Analisis menyoroti kelemahan homestay Desa Adat Gebong Memarong terkait fasilitas dan layanan pendukung dalam kerangka menekankan perlunya perbaikan pengelolaan sampah, penyediaan APAR, penambahan fasilitas penunjang seperti bank dan ATM, peningkatan infrastruktur telekomunikasi, serta peningkatan kompetensi pengelola homestay demi pengalaman wisatawan yang lebih baik pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
8	Pasar Semarang Tinjomoyo sebagai Bentuk Inovasi Pengembangan Pariwisata Hutan Wisata Tinjomoyo di Kota Semarang. Gilby, Yuniningsih, dan Dwimawanti (2021)	Kualitatif Deskriptif	Konsep Rogers yang dijabarkan dalam Suwarno (2008:17), kelima atribut inovasi yang dianalisis adalah <i>Relative Advantage</i> (Keuntungan Relatif), <i>Compatibility</i> (Kesesuaian), <i>Complexity</i> (Kerumitan), <i>Triability</i> (Kemungkinan Dicoba), dan <i>Observability</i> (Kemudahan Diamati).	Pasar Semarang Tinjomoyo memiliki keunggulan ekonomis signifikan dan berperan dalam memperbaiki citra Hutan Wisata Tinjomoyo meskipun menghadapi beberapa kendala. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pengalaman dalam transaksi digital serta hambatan alam seperti hujan yang membuatnya sulit diterapkan secara konsisten. Meskipun publikasi digital telah mempermudah akses informasi, semua masyarakat memiliki akses yang sama. Pengembangan pasar terhambat oleh ketergantungan pada program Generasi Pesona Indonesia serta kendala dalam anggaran dan perencanaan jangka pendek yang kurang memadai.
9	<i>Identifying 4a's Component (Attraction, Accessibility, Amenity, And Ancillary) In Sade Tourism Village.</i>	Kualitatif Deskriptif	Komponen penunjang wisata berdasarkan konsep 4A menurut Sugiyama (2014:72), yaitu <i>Attraction, Amenities, Ancillary, dan Accessibility</i> .	Dalam penelitian ditemukan bahwa tata kelola pariwisata di kawasan wisata Kota Yogyakarta memiliki model hexa helix yaitu Pemerintah Yogyakarta didukung Pemerintah DIY, industri, perguruan tinggi, masyarakat, lingkungan dan media (hexa helix). Interaksi dilakukan secara

	Utomo, D. K. S., Gusadi, M. H., Rahmi, U. A., Ramadhan, G., & Pratiwi, W. D. (2024).			bersama-sama untuk meningkatkan kinerja helix lainnya yang didu oleh komponen atraksi, aksesibilitas, amenitas dan <i>ancillary services</i> .
10	Strategy Of Mangrove Tourism In Panglong Village, Bintan Regency. Andesta, I., Andre, H., & Richard, L. (2024).	Kualitatif Deskriptif	Konsep Sugiana (2014:72), komponen penunjang pariwisata yang dianalisis meliputi 4A, yaitu <i>Attraction, Amenities, Ancillary, dan Accessibility</i> .	Meskipun Kampung Mangrove Panglong memiliki potensi besar, m wisatawan untuk mengunjungi lokasi tersebut masih rendah kar pembangunan yang tidak berkelanjutan mengakibatkan kurang fasilitas pendukung. Melalui observasi, wawancara, dan studi pust dengan menggunakan teori 4A, strategi pengembangan wisata mangr di Kampung Panglong difokuskan pada peningkatan atra aksesibilitas, fasilitas pelayanan, dan layanan pendukung, s perbaikan kelembagaannya.
11	Analisis Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Berdasarkan Komponen 6A Di Taman Wisata Guci Tegal, Jawa Tengah. Anggriani, L., & Rosanto, S. (2023).	Kualitatif Deskriptif	Enam komponen penunjang pariwisata yaitu <i>Attraction, Amenities, Accessibilities, Activity, Ancillary, dan Accomodation</i> (Buhalis,2000)	Berdasarkan hasil penelitian di Taman Wisata Guci, peneliti menyimpulkan bahwa, terdapat beberapa komponen dari 6A di Taman Wisata yang sudah memenuhi standar. Namun masih ada beberapa komponen yang ikembangkan lagi seperti komponen amenities (restoran, souvenir toilet, tempat parkir, tempat sampah), dan accessibility dikarenakan b memenuhi standar sesuai dengan teori.
12	Analisis Potensi Wisata Desa Wisata Tarabunga, Kabupaten Toba, Sumatera Utara Sinaga, T. B. H., & Hasan, H. (2024).	Kualitatif Deskriptif	Enam komponen penunjang pariwisata yaitu <i>Attraction, Amenities, Accessibilities, Activity, Ancillary, dan Accomodation</i> (Buhalis,2000)	Aksesibilitas terkait infrastruktur jalan kurang, <i>Ancillary</i> yaitu terkait layanan fasilitas pendukung berupa layanan perbankan masih minim.
13	Eksplorasi Potensi Pengembangan Wisata Alam Menggunakan Pendekatan 4A dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan.	Kualitatif Deskriptif	Komponen penunjang wisata berdasarkan konsep 4A menurut Sugiana (2014:72), yaitu <i>Attraction, Amenities, Ancillary, dan Accessibility</i> .	Gunung Jae menawarkan keindahan alam, namun terkendala fasili aksesibilitas, dan pengelolaan lingkungan. Perlu pemberday masyarakat lokal dan perhatian pada aspek sosial budaya. Solusi meliputi peningkatan fasilitas dan akses, pemberdayaan masyara

	Anggara, B., Taufik, M., & Mandala, O. S. (2024).			perlindungan lingkungan, dan promosi budaya, agar Gunung Jae men destinasi pariwisata berkelanjutan.
14	Analisis Pengembangan Wisata Baru Sideland melalui 3A (Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas). Sukmawati, E., Nakhwatunnisa, H., & Wibicakso, N. (2023).	Kualitatif Deskriptif	Brown dan Stange (2015) dalam bukunya yang berjudul <i>Tourism Destination Management</i> mengemukakan bahwa komponen dalam pengembangan pariwisata terdiri dari ini adalah 3A yaitu <i>Attraction, Activity dan Accessibility</i> .	Dalam strategi pengembangan wisata komponen 3A (Atraksi, Ameni dan Aksesibilitas) sangat berpengaruh terhadap minat pengunjung. Berdasarkan penelitian di wisata Sideland atraksi utama dalam berwi yaitu kolam renang dengan pemandangan alam, sedangkan kompo amenitas dan aksesibilitas masih ada kekurangan di wisata <i>Sideland</i> . Dampak pengembangan wisata <i>Sideland</i> dirasakan oleh masyara setempat dengan adanya wisata <i>Sideland</i> memberikan peluang b masyarakat untuk memiliki pekerjaan dan meningkatnya pendapatan sebelumnya dan meningkatkan perekonomian warga.
15	<i>The Importance And Performance Of 3a's: A Case Study Of Taman Wisata Alam Gunung Papandayan, Indonesia.</i> Yusuf, R. F., & Goenadhi, F. (2024). <i>Bogor Hospitality Journal</i>, 8(1), 1-9.	Kualitatif Deskriptif	Brown dan Stange (2015) dalam bukunya yang berjudul <i>Tourism Destination Management</i> mengemukakan bahwa komponen dalam pengembangan pariwisata terdiri dari ini adalah 3A yaitu <i>Attraction, Activity dan Accessibility</i> .	Berdasarkan informasi dari lima informan, tiga hal penting p ditingkatkan di Taman Wisata Alam Gunung Papandayan: pelestar alam, kurangnya tempat sampah, dan minimnya tempat ibadah. Pi pengelola mengakui kekurangan ini dan telah merencanakan perbaik namun belum diimplementasikan. Oleh karena itu, diperlukan tinda nyata untuk mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kualitas s keberlanjutan destinasi wisata alam ini. Solusi yang diusulkan untuk hal tersebut adalah mempertahankan daya tarik alam ta mengubahnya, menambah tempat sampah di titik-titik strategis den pemisahan jenis sampah organik dan non-organik, serta memben masjid atau mushola di lokasi strategis, bahkan menambahkan tem ibadah lain untuk memberikan keunikan bagi taman wisata alam. Solusi ini difokuskan untuk mengatasi kekurangan pada kuad "konsentrasi di sini".
16	Strategi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Paramitha, O. D., Kagungan, D., & Mulyana, N. (2020).	Kualitatif Deskriptif	Menurut Suryono (2004) strategi dalam pengembangan pariwisata berkaitan dengan persoalan: - Kebijakan pelaksanaan, Penentuan tujuan yang hendak dicapai - Penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana.	Perlu adanya pertemuan rutin sebagai evaluasi yang diadakan c Pokdarwis baik Air Terjun Way Lalaan maupun Pantai Terbaya g membahas perkembangan yang terjadi di objek pariwisata masing- masing sehingga setiap an Kelompok Sadar Wisata mengetahui perkembangan dengan baik sehi meminimalisir kurang efektifnya komunikasi dan memaksim pengembangan pariwisata
17	Strategi Pengembangan Objek Wisata Alam Pantai Paropo Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi. Sihombing, S. B. (2022).	Kualitatif Deskriptif	Menurut Suryono (2004) strategi dalam pengembangan pariwisata berkaitan dengan persoalan: -Kebijakan pelaksanaan,	Diperlukan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi, Kecamatan Silahisabungan, dan Aparat Desa den pengelola Pantai Paropo dalam menyusun perencanaan pariwisata y berfokus pada kesejahteraan masyarakat sekitar dan meningkat promosi untuk menarik wisatawan. Pihak swasta juga diharap

			Penentuan tujuan yang hendak dicapai - Penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana.	berkontribusi dalam pengembangan Pantai Paropo sesuai kebutuhan fungsi pariwisata.
18	Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Pantai Muaro Lasak sebagai Ikon Parawisata. Putra, R. S., & Adnan, M. F. (2021).	Kualitatif Deskriptif	Perencanaan dan pengembangan pariwisata oleh Yoeti (1997:2) : 1. Wisatawan 2. Fasilitas Transportasi 3. Objek Fasilitas 4. Wisata Pelayanan 5. Informasi dan Promosi	Diperlukan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dairi, Kecamatan Silahisabungan, dan Aparat Desa dengan pengelola Pantai Paropo untuk menyusun perencanaan pariwisata yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat lokal dan promosi yang lebih efektif. Selain itu, pihak swasta diharapkan turut mengembangkan Pantai Paropo sesuai kebutuhan dan fungsi pariwisata.
19	Pengembangan Pariwisata Kawasan Baturraden. Diwangkara, N. K., Sari, S. R., & Rukayah, R. S. (2020).	Kualitatif Deskriptif	Perencanaan dan pengembangan pariwisata oleh Yoeti (1997:2) : 1. Wisatawan 2. Fasilitas Transportasi 3. Objek Fasilitas 4. Wisata Pelayanan 5. Informasi dan Promosi	Baturraden telah berkembang dengan baik dalam hal konten dan fasilitas, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Perubahan tata ruang yang terjadi masih dalam batas wajar dan bertujuan untuk mengakomodasi wisatawan. Untuk pengembangan selanjutnya, diperlukan adanya TIC dan penambahan trayek BRT untuk memudahkan wisatawan, serta pengontrolan tata ruang yang lebih baik untuk mencegah kepadatan yang tidak teratur dan perlunya koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam penataan lokasi investasi agar menghambat Baturraden sebagai destinasi wisata utama.
20	Analisis Komponen Pariwisata Dan Zonasi Kawasan Pariwisata Melalui Teori Tripartite Di Kawasan Wisata Pantai Kedonganan. Hartono, A., Regita, G. M. N., Saputra, N. W., Damayanti, N. W. M., Semara, I. M. T., Arianty, A. A. S., & Suwintari, G. A. E. (2024).	Kualitatif Deskriptif	Enam komponen penunjang pariwisata yaitu <i>Attraction, Amenities, Accessibilities, Activity, Ancillary</i>, dan <i>Accommodation</i> (Buhalis,2000)	Desa Kedonganan telah memenuhi beberapa aspek pariwisata, yaitu <i>Attraction</i> (pantai, restoran, mangrove), <i>Amenities</i> (akomodasi, toko, fasilitas) Keterlibatan Masyarakat. Namun, perlu perbaikan pada Aspek <i>Pendukung</i> (kurangnya pusat informasi dan kelompok sadar wisata) dan <i>Aksesibilitas</i> (akses pasar). Selain itu, zonasi wilayah belum tepat, terutama zona yang seharusnya hanya pantai, tetapi telah dibangun restoran yang berdekatan dengan pantai. Penataan zonasi penting untuk keberlanjutan pariwisata lingkungan.

1.6.2 Administrasi Publik

Menurut Harbani Pasolong (2010), administrasi publik adalah kerjasama antara sekelompok orang maupun lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Dalam hal ini, administrasi publik berfokus pada proses yang melibatkan berbagai pihak yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini bertujuan agar seluruh kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan cara yang efisien dan efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, serta memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Administrasi publik memiliki peran kunci dalam menjaga keteraturan dan keberlanjutan proses pemerintahan yang dihadirkan untuk masyarakat.

Selain itu, Chandler dan Plano (1988) dalam Keban (2014) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya serta personel publik untuk membuat, melaksanakan, dan mengelola keputusan kebijakan publik. Dalam pengertian ini, administrasi publik memerlukan adanya pengaturan yang baik terhadap berbagai elemen, seperti sumber daya manusia dan material, yang berperan dalam merealisasikan kebijakan pemerintah. Menurut Starling dalam Keban (2014), administrasi publik juga terkait erat dengan aspek *"the accomplishing side of government,"* yaitu upaya untuk mencapai hasil-hasil yang dijanjikan pemerintah, yang telah tercantum dalam janji kampanye atau pernyataan politik, dan memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut McDurry dalam Keban (2014: 3), administrasi publik merupakan sebuah ilmu yang dapat dikaji menggunakan pendekatan politik. Dalam pandangannya, administrasi publik bukan hanya sebuah teori, tetapi juga metode untuk menjalankan perintah di wilayah yang telah ditentukan, yakni negara. Pendekatan ini menekankan pada bagaimana negara mengelola dan menjalankan fungsinya melalui berbagai kegiatan administratif yang didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu.

Berbeda dengan pandangan McDurry, Barton dan Chappel, yang dikutip oleh Stillman II dalam Keban (2014: 5), mengartikan administrasi publik sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemegang kekuasaan di suatu negara. Fokus pendapat ini lebih menekankan pada keterlibatan individu atau anggota dalam memberikan pelayanan kepada publik, serta bagaimana lembaga-lembaga tersebut beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi publik, dalam pandangan ini, berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban lembaga negara dalam menjalankan pelayanan publik.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Federick A. Cleveland yang dikutip oleh Widanti (2022: 21), yang menyatakan bahwa administrasi publik memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan sosial dan penciptaan suasana demokrasi. Administrasi publik bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung, dan manfaatnya akan lebih dirasakan jika pemerintah dapat menerapkan sikap profesionalisme serta menggunakan pedoman yang efektif dan efisien dalam setiap kegiatan. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat memperkuat demokrasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga mereka

dapat memahami dan mendukung tanggung jawab administrasi publik, yang pada akhirnya akan membentuk sebuah demokrasi yang terorganisir.

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu proses kolaborasi antara individu dan lembaga untuk menjalankan tugas pemerintahan demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien dan efektif. Hal ini melibatkan pengorganisasian sumber daya dan personel untuk melaksanakan kebijakan publik dengan tujuan agar pelayanan publik dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Selain itu, administrasi publik juga berperan penting dalam memastikan bahwa janji politik pemerintah dapat terealisasi dengan baik melalui pengelolaan yang tepat terhadap berbagai elemen. Melalui pengaturan yang baik, administrasi publik dapat memperkuat demokrasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry dalam Keban (2014 : 31) bahwa terdapat enam pergeseran paradigma dalam administrasi publik, yaitu sebagai berikut :

- 1. The Politics - Administration Dichotomy, (1900 – 1926);*

Goodnow dalam Keban (2014) menyatakan jika fungsi utama dari pemerintah ada dua yaitu fungsi politik yang didalamnya terdapat tugas yang dimiliki oleh pemerintah guna membuat kebijakan atau mencetuskan keinginan bangsa. Selanjutnya terdapat fungsi administrasi yang merupakan implementasi dari kebijakan.

2. *The Principles of Administration*, (1927 – 1937);

Paradigma ini mengungkapkan bahwa fokus lebih utama dibanding locus. Prinsip-prinsip administrasi negara menunjukkan perkembangan ini dan membuktikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di semua tingkatan administrasi, tanpa memandang fungsi, lingkungan, misi, atau struktur institusi. Prinsip-prinsip administrasi yang paling terkenal dari Gullick dan Urwick adalah POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting).

3. *Public Administration as Political Science*, (1950 – 1970);

Paradigma ini bertujuan untuk memperjelas kembali hubungan antara administrasi negara dan ilmu politik. Fokus utama dari paradigma ini adalah pada birokrasi pemerintahan dan wilayah kepentingan. Oleh karena itu, dari paradigma ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik harus dirancang untuk memperhatikan kebutuhan masyarakat sebagai warga negara, bukan sebagai pelanggan. Ini termasuk mengutamakan kepentingan umum, melibatkan masyarakat, berpikir strategis dan bertindak secara demokratis, serta memperhatikan norma, nilai, dan standar yang ada sambil menghargai masyarakat.

4. *Public Administration as Management*, (1956 – 1970);

Paradigma ini mencakup prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer. Paradigma ini menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi, namun tidak menentukan di lingkungan kelembagaan mana keahlian tersebut harus diterapkan. Fokus dari paradigma ini adalah pada

perkembangan ilmu administrasi murni, didukung oleh psikologi sosial, serta kebijakan publik. Semua fokus yang dikembangkan diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam administrasi, sehingga menentukan lokasi penerapannya menjadi tidak jelas.

5. *Public Administration as Public Administration*, (1970 – 1990;

Paradigma ini menegaskan bahwa administrasi publik adalah disiplin ilmu yang berdiri sendiri, dengan teori, istilah, objek, dan metode yang khas. Administrasi publik memfokuskan perhatian pada ilmu kebijaksanaan, politik ekonomi, proses pembuatan kebijakan dan analisisnya, serta cara pengukurannya. Paradigma ini menghubungkan perhatian antara fokus administrasi publik dan lokasi penerapannya, di mana fokusnya mencakup teori organisasi, analisis kebijakan publik, teknik administrasi, dan manajemen. Sementara itu, lokasi normatifnya terletak pada birokrasi pemerintahan dan isu-isu masyarakat

6. *Governance*, (1990 – sekarang).

Governance didefinisikan sebagai implementasi kekuasaan atau wewenang yang dilakukan pemimpin politik demi kesejahteraan warga negara. Terjadi proses kompleks yang melibatkan berbagai sektor masyarakat yang memiliki kekuasaan maupun wewenang dalam memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung memiliki dampak terhadap masyarakat dan lembaga serta pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014). perubahan persepsi pemerintah dan administrasi yang terjadi perubahan paradigma ini dicatat dalam 3 klasifikasi:

a. Globalisasi.

Globalisasi melibatkan penggabungan perubahan multinasional internet, isu-isu lingkungan di seluruh dunia dan perdagangan internasional.

b. Redefinisi

Redefinisi melibatkan proses yang sebenarnya dari pemerintah untuk mendefinisikan kembali posisi pemerintah. Pemerintah bergerak dari kekuasaan dan hierarki menuju kolaborasi dan kemitraan.

c. Devolusi

Devolusi termasuk partisipasi warga negara, kelompok warga, kemitraan swasta publik, sektor nirlaba, sektor swasta, otoritas publik, asosiasi pemerintahan dan pemerintahan lainnya.

Selama masa paradigma ini, administrasi publik beralih dari mengontrol warga menjadi upaya menyediakan kebijakan publik, hukum, serta organisasi dan lembaga yang dikelola oleh warga. Perbedaan kelembagaan antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan sektor nirlaba semakin kabur, sementara restrukturisasi organisasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan enam paradigma tersebut penelitian “Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang relevan dengan paradigma Governance (1990- sekarang) dalam administrasi publik. Governance didefinisikan sebagai implementasi kekuasaan atau wewenang yang dilakukan pemimpin politik demi kesejahteraan warga negara, melibatkan proses kompleks berbagai sektor masyarakat dalam memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang

berdampak pada masyarakat, lembaga, serta pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014). Perubahan paradigma ini dicirikan oleh tiga klasifikasi utama: Globalisasi, yang menekankan keterkaitan isu global; Redefinisi, di mana pemerintah bergerak dari hierarki menuju kolaborasi dan kemitraan, serta Devolusi yang mencakup partisipasi warga negara, kelompok warga, dan kemitraan publik-swasta. Aspek devolusi ini secara khusus mendukung pelimpahan kewenangan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi.

1.6.4 Manajemen Publik

Menurut Nor Ghofur (2014), Manajemen publik adalah pengelolaan pemerintahan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelayanan kepada masyarakat. Menurut Keban (2008), manajemen publik mengacu pada usaha seseorang untuk bertanggung jawab dalam mengelola suatu organisasi dan memanfaatkan sumber daya manusia dan mekanik untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen publik menitikberatkan pada urusan internal organisasi, khususnya masalah pengelolaan organisasi publik agar dapat berjalan secara maksimal guna meraih hasil yang telah ditetapkan. Pada akhirnya suatu komunitas publik tidak dapat lepas dari kenyataan yang ada diluar komunitas organisasi yang dibayangi oleh adanya kebijakan publik serta keperluan politik.

Laurence Lynn (1996) mengkaji tiga kemungkinan yang menggambarkan manajemen publik, yaitu seni, sains, dan profesi. Administrasi publik dianggap suatu seni karena kegiatan inovatif dilakukan pelaku tertentu belum dapat ditekuni secara numerik. Itu berarti bahwa pengelolaan publik merupakan kegiatan yang

sangat fleksibel dan sangat bergantung pada situasi dan kondisi operasional. Administrasi publik merupakan ilmu yang memiliki arti sebagai administrasi public yang membutuhkan penjabaran terstruktur melalui penafsiran dan penjelasan. Di sisi lain, dengan menganggap administrasi publik sebagai sebuah profesi, mengacu pada sekelompok orang yang mengabdikan pada ilmu tersebut.

Menurut Overman dalam Keban (2014: 92), manajemen publik merupakan ilmu interdisipliner yang mencakup elemen-elemen organisasi atau lembaga secara umum, serta kolaborasi berbagai fungsi manajemen seperti POAC, yang melibatkan unsur-unsur manusia, keuangan, informasi, dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen publik tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi pengelolaan organisasi dalam konteks pemerintahan. Menurut Wilson dalam Keban (2014 : 100) berpendapat bahwa terdapat empat studi administrasi publik yang ada didalam manajemen publik hingga sekarang yaitu :

1. Pemerintah yang berperan sebagai pelaku utama dari sebuah organisasi
2. Eksekutif menjadi fungsi utama
3. Identifikasi terhadap cara – cara dan pengoptimalan manajemen menjadi hal yang utama dari berkembangnya kompetensi administrasi
4. Metode perbandingan yang merupakan sebuah metode untuk studi ataupun mengembangkan hal hal dalam bidang administrasi publik.

Dari pernyataan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa Manajemen publik dapat dipahami sebagai suatu pengelolaan pemerintahan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Hal ini melibatkan pengelolaan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan mekanik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen publik tidak hanya fokus pada urusan internal organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan publik dan kebutuhan politik yang ada di luar komunitas organisasi tersebut.

1.6.5 Pariwisata

Kata “pariwisata” atau “*tourism*” dalam bahasa Inggris memiliki arti perjalanan yang dilakukan beberapa kali dari satu tempat ke tempat yang lain. Pariwisata dapat diartikan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain dengan guna rekreasi secara individu maupun kelompok (Spillane, 1987). Menurut Burkart dan Medlik (1981) Pariwisata merupakan perjalanan sementara individu ke tempat-tempat di luar lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan mereka yang biasa, aktivitas yang mereka lakukan selama tinggal di lokasi tersebut, serta fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menurut Yoeti (1997:63) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, dari satu tempat ke tempat lain, dengan maksud tujuan bukan berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi semata-mata sebagai konsumen menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam.

Berdasarkan UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata memiliki makna yakni berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Menurut Yoeti dalam Yuniningsih (2018) pariwisata harus memenuhi empat kriteria di bawah ini, yaitu:

1. Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain, perjalanan dilakukan di luar tempat kediaman di mana orang itu biasanya tinggal;
2. Tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau DTW yang dikunjungi.
3. Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, di mana dia bisa tinggal atau berdiam, dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan; dan
4. Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih

Menurut Suwena dan Widyatmaja (2017) berikut ini merupakan ciri atau kriteria perjalanan pariwisata yakni:

- a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
- b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain
- c. Perjalanan itu; walaupun apapun bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi
- d. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Selain itu, Suwena dan Widyatmaja (2017) juga menjelaskan bahwa pariwisata dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:
1. Pariwisata lokal (local tourism) yakni jenis pariwisata yang ruang lingkungannya terbatas pada tempat tertentu.
 2. Pariwisata regional (regional tourism) merupakan kegiatan pariwisata yang berkembang di wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional, seperti kepariwisataan Bali, Yogyakarta, dan lain-lain.
 3. Pariwisata nasional (national tourism) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warga negaranya sendiri tetapi juga orang asing yang berdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.
 4. Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN.
 5. Pariwisata internasional (International tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.
 6. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

- a. Pariwisata aktif (in bound tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.
- b. Pariwisata pasif (outgoing tourism) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang dibelanjakan itu terjadi di luar negeri
- c. Menurut Objeknya
 - 1) Cultural tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.
 - 2) Recuperational tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.
 - 3) Commercial tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.

- 4) Sport tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.
- 5) Political tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara
- 6) Social tourism yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, picnic, dan lain-lain.
- 7) Religion tourism yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama Islam, dan lain-lain.
- 8) Marine tourism merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.

Dapat disimpulkan bahwa, Pariwisata adalah kegiatan perjalanan sementara yang dilakukan individu atau kelompok ke suatu tempat di luar lingkungan tempat

tinggal atau pekerjaan mereka, dengan tujuan utama untuk rekreasi, eksplorasi, atau kepentingan tertentu. Kegiatan ini melibatkan aktivitas di lokasi tujuan, didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, serta pelaku usaha, guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Pariwisata tidak hanya mencakup mobilitas fisik, tetapi juga interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang memperkaya pengalaman pengunjung sekaligus mendukung perkembangan daerah tujuan wisata. Apabila ditinjau dari jenis pariwisata maka Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang dapat dikategorikan sebagai pariwisata lokal ditinjau dari ruang lingkup yang sempit dan terbatas. Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang dikategorikan sebagai social tourism dikarenakan dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, picnic, dan lain-lain.

1.6.6 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah proses berkelanjutan yang melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pemantauan aktivitas pariwisata untuk memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan wisatawan (Jafari, 1989). Menurut Hall (2008) Pengembangan pariwisata melibatkan pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan melalui perencanaan strategis, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang bijaksana untuk memastikan bahwa pariwisata

dapat memberikan manfaat jangka panjang. Sedangkan menurut Brown dan Stange (2015) dalam bukunya yang berjudul *Tourism Destination Management* mengemukakan bahwa komponen dalam pengembangan pariwisata terdiri dari ini adalah 3A yaitu *Attraction, Activity dan Accesibility*. Yoeti (2002) mengatakan bahwa komponen penunjang wisata adalah komponen kepariwisataan yang harus ada didalam destinasi wisata. Komponen kepariwisataan tersebut adalah 4A yaitu *Attraction, Amenities, Activity dan Accesibility*. Buhalis (2000:98) mengemukakan teori yang berbeda bahwa komponen pengembangan pariwisata terdiri dari 6A yaitu *Attraction, Amenities, Ancillary, Activity, Accessibilities dan Accomodation* yang memiliki makna :

1. Atraksi (*Attraction*):

Menurut Cooper dkk (1995: 81), Atraksi atau atraksi yakni komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan. suatu daerah dapat menjadi tujuan wisata jika kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi wisata. Apa yang dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan. Untuk menemukan potensi kepariwisataan di suatu daerah orang harus berpedoman kepada apa yang dicari oleh wisatawan. terdapat 3 modal atraksi yang menarik kedatangan wisatawan, yaitu 1) Natural Resources (alami), 2) Atraksi wisata budaya, dan 3) Atraksi buatan manusia itu sendiri. Modal kepariwisataan dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata ditempat dimana modal tersebut ditemukan. Ada modal kepariwisataan yang dapat dikembangkan sehingga

dapat menahan wisatawan selama sehari-hari dan dapat berkali-kali dinikmati, atau bahkan pada kesempatan lain wisatawan bisa berkunjung ketempat yang sama.

2. Amenitas (*Amenities*) :

Amenitas mencakup berbagai fasilitas yang disediakan di destinasi wisata untuk mendukung kenyamanan dan kebutuhan wisatawan, termasuk layanan perjalanan, restoran, tempat perbelanjaan, dan fasilitas kesehatan (Hadiwijoyo,2012)

3. Layanan Pendukung (*Ancillary*)

Menurut Wargenau dan Deborah dalam Sugiama (2011), Ancillary adalah organisasi yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata, seperti pemerintah, asosiasi pariwisata, dan tour operator. Mereka menyediakan berbagai dukungan untuk kegiatan wisata, baik dalam bentuk kebijakan maupun layanan praktis. Ancillary merupakan hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, Tourist Information, Travel Agent dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan (Cooper dkk (1995: 81).

4. Akses (*Accessibilities*)

Akses mencakup fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan untuk menuju destinasi wisata, sehingga harus tersedia jasa seperti penyewaan kendaraan dan transportasi lokal, rute atau pola perjalanan (Cooper dkk, 2000). Menurut Sugiama (2011) aksesibilitas adalah tingkat intensitas suatu daerah tujuan wisata atau destinasi dapat dijangkau oleh wisatawan.

5. Aktivitas (*Activities*)

Aktivitas berhubungan dengan kegiatan di destinasi yang akan memberikan pengalaman bagi wisatawan. Setiap destinasi memiliki aktivitas yang berbeda sesuai dengan karakteristik destinasi wisata tersebut (Brown and Stange, 2015)

6. Penginapan (*Accommodation*)

Menurut Hadiwijoyo (2012), Akomodasi adalah tempat tinggal yang disediakan untuk wisatawan, baik di destinasi wisata yang berbasis alam, kota, atau desa wisata. Akomodasi ini bisa berupa hotel, homestay, pondok wisata, hingga penginapan yang lebih sederhana, tergantung pada karakteristik destinasi tersebut. Menurut Suryono (2004) strategi dalam pengembangan pariwisata berkaitan dengan persoalan:

1. Kebijakan pelaksanaan,
2. Penentuan tujuan yang hendak dicapai
3. Penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana-prasarana.

Menurut Pearce (1989), unsur-unsur yang harus tersedia di dalam upaya pengembangan pariwisata adalah

1. Atraksi Wisata : Atraksi ini dapat berupa keanekaragaman flora dan fauna, bentuk lahan bersejarah dan moderen seperti Katedral, monumen, kasino, taman hiburan, museum, peninggalan budaya dalam bentuk keanekaragaman bahasa, musik tradisional, folklore, tari-tarian dan makanan tradisional serta kerajinan tangan;

2. Transportasi: Sarana transportasi sangat dibutuhkan di dalam pengembangan obyek wisata, seperti penyediaan sarana angkutan umum yang baik dan murah dan dengan jumlah armada pengangkutnya yang cukup;
3. Akomodasi: Dalam industri pariwisata, dikenal akomodasi komersial yang telah ditentukan seperti; hotel, motel, wisma, losmen; dan akomodasi pribadi.
4. Fasilitas Pendukung dan Jasa Lain : Dapat berupantoko-toko souvenir, toko peralatan olah raga, apotik, pujasera, dan mall atau departement store, restoran, bank, salon kecantikan, dan rumah sakit,
5. Infrastruktur: Kebutuhan akan infrastruktur yang paling dominan adalah untuk mendukung kelancaran akses baik menuju maupun dari tempat asal ke daerah tujuan wisata.

Salah satu teori pengembangan pariwisata yaitu teori yang dikemukakan oleh Yoeti (1997:2), bahwa perencanaan dan pengembangan pariwisata perlu memperhatikan beberapa aspek, yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Wisatawan (*tourist*)

Perlunya mengetahui bagaimana karakteristik dari wisatawan yang akan berkunjung, dari negara mana mereka datang, berapa usia, hobi, dan pada musim apa saja mereka melakukan perjalanan wisata ke tempat tertentu.

2. Fasilitas Transportasi, dalam

Pengembangan parawisata harus dilakukan penelitian bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia untuk membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata yang dituju sehingga memudahkan mereka berpindah ke tempat wisata satu ke tempat wisata lainnya.

3. Objek wisata,

Objek wisata yang akan dijual dan dituju , apakah memenuhi tiga syarat seperti:

- a) Apa yang dapat dilihat bagaimana tempat yang tersediasehingga menarik minat mereka melihat tempat tersebut (*something to see*),
- b) Apa yang dapat dilakukan, apa saja yang dapat dilakukan di tempat wisata tersebut harus tersedianya tempat- tempat rekreasi sehingga para wisatawan tidak merasa bosan berkunjung kesana (*something to do*),
- c) Apa yang dapat dibeli, apa yang dapat dibeli harus tersedianya fasilitas tempat makanan di tempat parawisata tersebut (*something to buy*).

4. Fasilitas pelayanan,

Fasilitas apa saja yang tersedia di DTW tersebut, bagaimana akomodasi perhotelan yang ada, restaurant, pelayanan umum seperti bank, kantor pos, telepon, yang ada di

DTW tersebut.

5. Informasi dan promosi, diperlukan

Publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana brosur disebar

sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan pariwisata di wilayahnya dan harus menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata adalah proses yang mencakup berbagai aspek untuk menciptakan destinasi wisata yang menarik, berkelanjutan, dan memberikan manfaat jangka panjang. Proses ini melibatkan pengelolaan atraksi wisata yang dapat berupa potensi alam, budaya, maupun buatan manusia, serta dukungan aksesibilitas yang meliputi transportasi dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, pentingnya fasilitas penunjang seperti amenities (restoran, tempat perbelanjaan, fasilitas kesehatan), akomodasi (hotel, homestay, dan jenis penginapan lainnya), aktivitas wisata yang unik, serta layanan pendukung (ancillary) seperti organisasi pengelola, kebijakan pemerintah, dan peran stakeholder tidak dapat diabaikan. Pendekatan strategis, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta pelestarian sumber daya alam dan budaya merupakan indikator penting dalam pengembangan pariwisata agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan.

1.6.7 POKDARWIS

Menurut Rahim (2012) dari buku Pedoman Kelompok Sadar Wisata, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan

memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Tujuan adanya pelaksanaan kegiatan kelompok sadar wisata di dalam Peraturan Menteri Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman segenap komponen masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai wisatawan untuk mengenali dan mencintai tanah air.

Tujuan tersebut didukung dengan lingkup kegiatan dan peran Pokdarwis yang menurut buku panduan Kelompok Sadar Wisata adalah berbagai kegiatan yang dapat diprogramkan dan dilaksanakan untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pembentukan organisasi Pokdarwis. Lingkup kegiatan tersebut meliputi, antara lain:

1. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan para anggota Pokdarwis dalam bidang kepariwisataan.
2. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan para anggota dalam mengelola bidang usaha pariwisata dan usaha terkait lainnya

3. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat agar menjadi tuan rumah yang baik dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di daerahnya.
4. Mengembangkan dan melaksanakan kegiatan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan daya tarik pariwisata setempat melalui upaya-upaya perwujudan Sapta Pesona.
5. Mengumpulkan, mengolah, dan memberikan pelayanan informasi kepariwisataan kepada wisatawan dan masyarakat setempat.
6. Memberikan masukan-masukan kepada aparat pemerintah dalam mengembangkan kepariwisataan di daerah setempat.

Enam kegiatan tersebut menyatakan bahwa untuk dan melaksanakan kegiatan serta mengembangkan pengetahuan dan wawasan pariwisata, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, melatih masyarakat dalam memberikan pelayanan pariwisata, serta mampu memberikan saran kepada pemerintah daerah upaya mengembangkan pariwisata di daerah tersebut memerlukan adanya peran dari kelompok sadar wisata (Pokdarwis)

1.6.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan Pariwisata

Faktor pendukung dan penghambat peran aktor menurut (Destiana et al., 2020) dalam pengembangan pariwisata adalah:

1. Nilai yang ada dan dibawa oleh masing-masing pemangku kepentingan
2. Komunikasi, dilihat dari seberapa sering antar aktor saling berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi baik secara lisan maupun tertulis untuk mencapai tujuan bersama
3. Kepercayaan, dilihat dari kepercayaan dari masing-masing aktor untuk menjalin kerjasama dengan aktor lain untuk mencapai tujuan bersama
4. Sumber kebijakan, dilihat dari bagaimana kebijakan yang ada dalam mewadahi hubungan antar aktor atau jaringan yang terbentuk dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Sunaryo (2013) Faktor Pendukung dan Penghambat suatu produk wisata (tourism supply side) yang biasanya berwujud sistem destinasi pariwisata akan terdiri atau menawarkan paling tidak beberapa komponen pokok sebagai berikut

1. Faktor Pendukung.
 - a. Daya tarik wisata yang bisa berbasis utama pada alam, budaya atau minat khusus.
 - b. Akomodasi atau amenitas, aksesibilitas dan transportasi (udara, darat, dan laut).
 - c. Fasilitas umum.

- d. Fasilitas pendukung pariwisata.
- e. Masyarakat sebagai tuan rumah (host) dari suatu destinasi.

2. Faktor Penghambat

- a. Belum dikelolanya dengan baik oleh pihak pemerintah yang berwenang dan belum tertatanya dengan baik aspek prasarana dan sarana yang sebenarnya dapat dijadikan daya dukung untuk pengembangan objek wisata di daerah.
- b. Keterbatasan prasarana dan sarana serta pengelolaan terhadap potensi wisata masih belum optimal. Hal tersebut merupakan dampak dari kurangnya alokasi anggaran dana yang diperuntukkan bagi pengembangan sektor pariwisata.

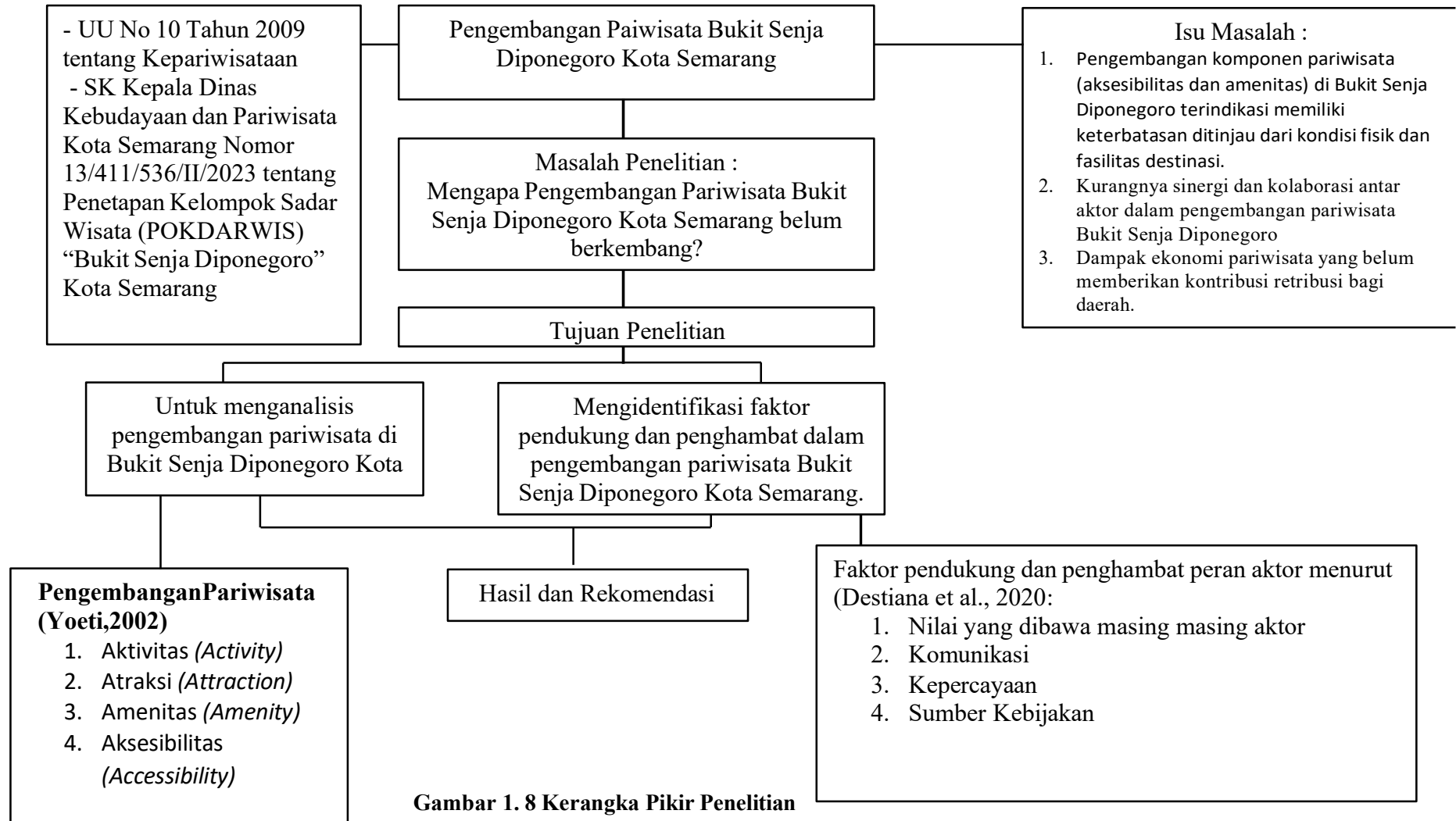
Menurut Pearce (1983, 25) terdapat faktor faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi obyek wisata, diantaranya :

- a) Kondisi fisis : Kondisi geografis, topografi, dan iklim di suatu destinasi wisata memainkan peran penting dalam pengembangannya. Lokasi yang memiliki keindahan alam seperti pantai, pegunungan, atau danau lebih mudah dikembangkan menjadi destinasi wisata.
- b) Aksesibilitas : Tingkat kemudahan untuk mencapai lokasi wisata menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pengembangan destinasi. Aksesibilitas mencakup jaringan transportasi, seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan stasiun, serta kemudahan moda transportasi lokal.
- c) Pemilikan dan penggunaan lahan : Status kepemilikan lahan dapat memengaruhi rencana pembangunan wisata, apakah lahan dimiliki

oleh pemerintah, masyarakat lokal, atau pihak swasta. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tujuan wisata, seperti area yang terlalu padat penduduk atau zona industri, dapat menjadi penghambat.

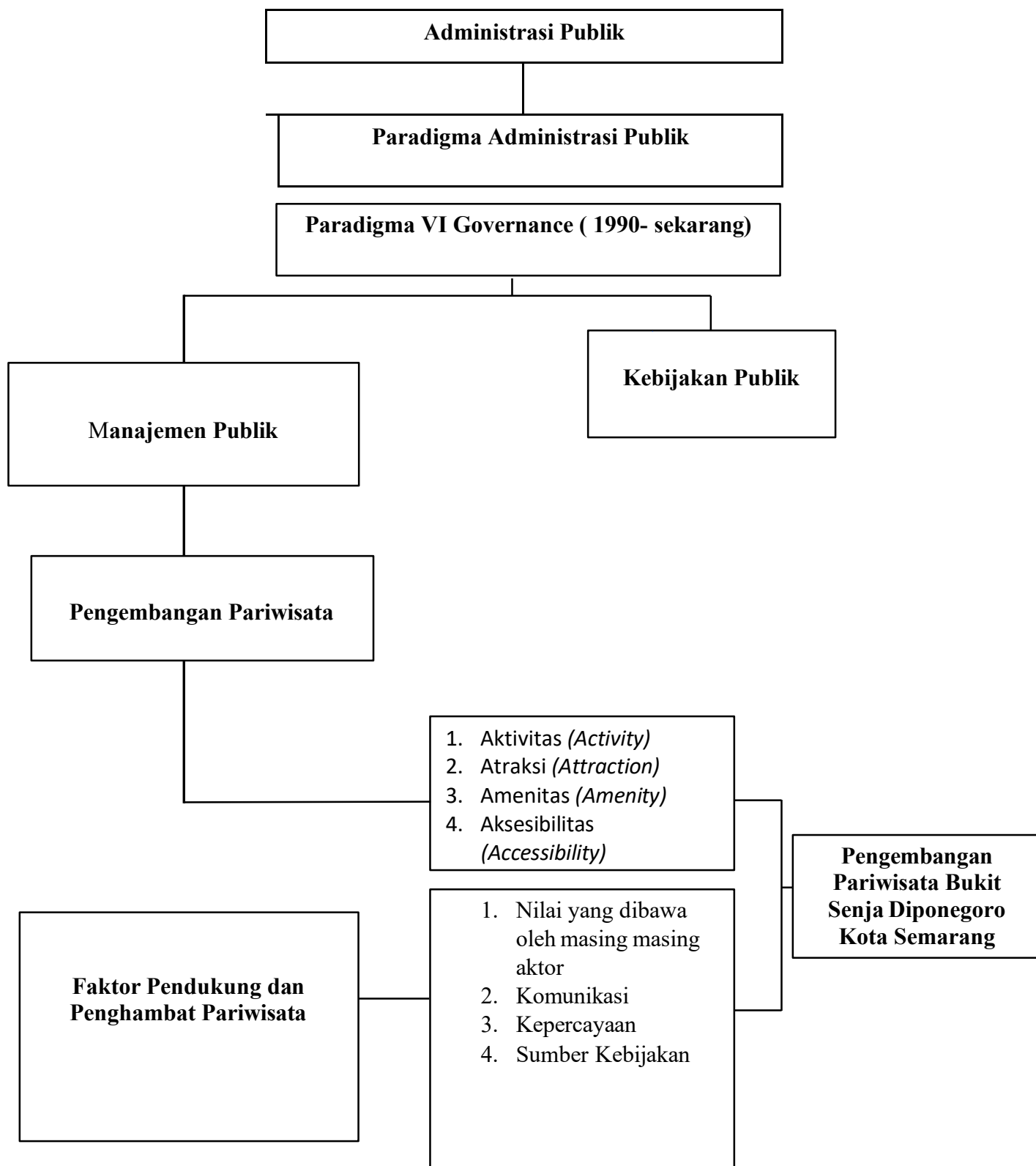
- d) Hambatan dan dukungan : Hambatan meliputi kendala birokrasi, konflik lahan, kurangnya pendanaan, atau resistensi masyarakat lokal terhadap pengembangan wisata. dan dukungan berupa peran serta pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta dalam menyediakan fasilitas, regulasi, atau promosi yang menunjang pengembangan objek wisata.
- e) Faktor lain : Berupa Tingkat upah yang kompetitif dapat memengaruhi kemampuan destinasi untuk menarik tenaga kerja terampil di sektor pariwisata. Selain itu, keamanan dan kestabilan politik suatu daerah menentukan minat wisatawan untuk berkunjung. Daerah yang aman cenderung lebih diminati oleh wisatawan dan investor.

1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. 8 Kerangka Pikir Penelitian

1.8 Kerangka Pikir Teori



Gambar 1. 9 Kerangka Berpikir Teori

1.9 Operasionalisasi Konsep

1.9.1 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata yakni pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan melalui perencanaan strategis, kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta pengelolaan sumber daya alam dan budaya yang bijaksana untuk memastikan bahwa pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang. Penelitian ini hanya akan melihat komponen 4A dalam pengembangan pariwisata, yakni :

- a. Atraksi : Suatu hal yang dapat dinikmati melalui indra penglihatan dan disebut juga pertunjukan yang diadakan untuk wisatawan. Dapat berupa.
 - Wisata alam
 - Wisata buatan
- b. Aktivitas: Aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan secara mudah dan nyaman.
 - Wisata kuliner
 - Wisata Edukasi
 - Wisata dengan Minat Khusus
- c. Aksesibilitas: Kemudahan berupa sarana yang disediakan untuk wisatawan
 - Akses jalan

- Transportasi umum
- Petunjuk arah
- Peta lokasi wisata
- Travel route

d. Amenitas: Prasarana yang ada pada tempat wisata yang dibuat oleh pelaku wisata

- Tempat penginapan
- Tempat makan dan minum
- Fasilitas umum (Area parkir, toilet umum, mushola, toko oleh-oleh)

1.9.2 Faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang

Adapun faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Nilai yang dibawa oleh masing masing aktor
 - Nilai organisasi yang dimiliki oleh stakeholder yang berinteraksi secara langsung dalam pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang
 - Nilai Legal sebagai legitimasi atas pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang

- Nilai Kepentingan Kolektif yang dimiliki oleh stakeholder yang berinteraksi secara langsung dan tidak langsung dalam Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang

2. Komunikasi

- Proses Komunikasi antar Pokdarwis, Kelurahan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Karang Taruna, Masyarakat RW 8 Kelurahan Tembalang, dan Dosen atau Akademisi
- Pesan Komunikasi Pokdarwis, Kelurahan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Karang Taruna, Masyarakat RW 8 Kelurahan Tembalang, dan Dosen atau Akademisi, dan PT Karya Usaha Baru
- Jaringan Komunikasi yang terdapat dalam pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro
- Ketergantungan antar aktor dalam pengembangan Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang
- Hubungan antar aktor yakni Tingkat kedekatan, intensitas, dan kualitas relasi antar aktor dalam pengembangan pariwisata.
- Lingkungan Komunikasi yakni elemen eksternal yang memengaruhi proses komunikasi berupa kondisi sosial, ekonomi dan teknologi, budaya, hingga geografis. pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang
- Ketidakpastian yang menyebabkan keraguan atau ambiguitas dalam pengambilan keputusan.

3. Kepercayaan : Keyakinan antar aktor dalam menjalankan komitmen bersama.
4. Sumber Kebijakan sebagai acuan normatif dan operasional bagi pemerintah dan aktor terkait dalam menjalankan, mengarahkan, serta mengembangkan Bukit Senja Diponegoro

1.10 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2019 : 2) metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah data dan data tersebut memiliki manfaat serta tujuan tertentu. Penjelasan cara ilmiah yaitu kegiatan yang didasarkan pada karakteristik keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian yang didasarkan pada metode - metode yang masuk akal, empiris yaitu metode – metode yang digunakan pada penelitian dapat diamati dan terlihat oleh seseorang, dan yang terakhir sistematis artinya tahap – tahap yang digunakan dalam penelitian bersifat logis. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana langkah – langkah dalam melakukan penelitian yang berguna untuk mencari jawaban dari masalah yang akan diteliti.

1.10.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Pada pendekatan kualitatif ini data diperoleh dari berbagai sumber untuk menggali kebenaran informasi tertentu dari berbagai metode dan sumber perolehan data. Biasanya peneliti memperoleh data dari wawancara secara langsung objek penelitian. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Dengan cara terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan para aktor yang terlibat.

Kegiatan terakhir adalah penyusunan laporan struktur dan fleksibel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian maupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sehingga dalam penyusunan laporan penelitian ini dapat mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari penelitian terkait Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang.

1.10.2 Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan sebagai penelitian. Dalam penelitian tentang Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang. Peneliti memilih lokasi ini karena keberadaan permasalahan pengembangan pariwisata yang jelas dan terverifikasi secara empiris melalui keluhan masyarakat dan observasi langsung; serta adanya potensi pariwisata yang signifikan namun belum teroptimalisasi.

1.10.3 Fenomena Penelitian

Tabel 1.2 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Informan
1	Pengembangan Pariwisata	Atraksi	1. Wisata alam 2. Wisata buatan	1. Pokdarwis Bukit Senja Diponegoro 2. Kelurahan Tembalang 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 4. Karang Taruna RW 8 Kelurahan Tembalang 5. Masyarakat sekitar 6. Akademisi/Dosen 7. Pengunjung 8. Media Massa
		Aktivitas	1. Wisata kuliner 2. Wisata edukasi 3. Wisata dengan Minat Khusus	
		Aksesibilitas	1. Akses jalan 2. Transportasi umum 3. <i>Travel route</i> 4. Petunjuk arah 5. Peta lokasi wisata	
		Amenitas	1. Penginapan (akomodasi) 2. Tempat makan dan minum 3. Fasilitas Umum	

2.	Faktor pendukung dan penghambat pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro	Nilai yang dibawa masing masing aktor	1. Nilai Organisasi 2. Nilai Legal 3. Nilai Kepentingan Kolektif	
		Komunikasi	1. Proses 2. Pesan 3. Jaringan 4. Keadaan saling tergantung 5. Hubungan 6. Lingkungan 7. Ketidakpastian	
		Kepercayaan	Kepercayaan yang dimiliki antar aktor dalam menjalin komitmen bersama	
		Sumber Kebijakan	Sumber Kebijakan sebagai acuan normatif dan operasional bagi pemerintah dan aktor terkait dalam menjalankan, mengarahkan, serta mengembangkan Bukit Senja Diponegoro	

--	--	--	--	--

1.10.4 Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini, individu atau kelompok yang berperan sebagai penyedia data dan informasi disebut sebagai informan. Pemilihan informan dilakukan secara selektif (*purposive*) berdasarkan kesesuaian dan pemahaman mendalam mereka terhadap fenomena yang diteliti, serta relevansi dengan fokus permasalahan pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008). Penelitian kualitatif umumnya mengidentifikasi tiga kategori informan berdasarkan kedalaman informasi dan peran mereka, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Penentuan informan utama dan pendukung dalam penelitian ini akan dilakukan melalui teknik *snowball sampling*, yaitu pemilihan informan berikutnya berdasarkan rekomendasi dari informan kunci atau informan sebelumnya yang dianggap memiliki informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan Informan Kunci

Informan kunci adalah individu yang memiliki pemahaman paling komprehensif, strategis, dan mendalam mengenai keseluruhan permasalahan serta konteks pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro. Mereka dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* untuk

mendapatkan gambaran holistik dan wawasan kebijakan. Dalam penelitian ini, yang termasuk informan kunci adalah:

- i. Perwakilan Pengurus Pokdarwis Bukit Senja Diponegoro
- ii. Lurah Tembalang
- iii. Kepala Bidang Kelembagaan Kepariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang

1. Informan Utama

Informan utama adalah individu yang memiliki pengalaman langsung atau pengetahuan detail pada aspek-aspek spesifik dari pengembangan pariwisata di Bukit Senja Diponegoro. Yang termasuk informan utama adalah:

- i. Ketua Karang Taruna RW 08 Kelurahan Tembalang
- ii. Pelaku UMKM di Bukit Senja Diponegoro

2. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah individu atau kelompok yang dapat memberikan informasi tambahan, konteks pelengkap, atau memverifikasi data yang telah diperoleh dari informan kunci dan utama. Mereka dipilih melalui teknik snowball sampling jika diperlukan untuk melengkapi informasi. Yang termasuk informan pendukung adalah:

- i. Masyarakat sekitar RW 08 Kelurahan Tembalang:

- ii. Pengunjung Bukit Senja Diponegoro
- iii. Akademisi
- iv. Mahasiswa yang tergabung dalam organisasi yang pernah terlibat dalam kegiatan pengembangan atau pemberdayaan di Bukit Senja Diponegoro
- v. Media Massa (*Content Creator*)

1.10.5 Jenis Data

Menurut Pakpahan,dkk (2021 : 66) jenis data dibagi menjadi dua yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada data kuantitatif diartikan sebagai sebuah data yang berbentuk angka, serta data tersebut didapatkan melalui perhitungan (penjumlahan, pengukuran, dll) pada sebuah variabel. Menurut Lofland dalam Moleong (2013:157-158) dalam penelitian kualitatif sumber data utama berupa kata-kata ataupun tindakan seperti wawancara, sumber tertulis, foto dan data statistik. Pada penelitian ini jenis data yang dipakai adalah data kualitatif karena data yang diambil berbentuk seperti rekaman, pengamatan, wawancara, atau studi literatur mengenai Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang

1.10.6 Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti yakni sumber data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara

langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data primer akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung di lokasi penelitian, serta melalui dokumentasi yang dihasilkan dari kegiatan wawancara dan observasi tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup dokumen resmi, regulasi terkait pariwisata, hasil-hasil studi terdahulu, jurnal ilmiah, berita, serta informasi relevan lainnya yang diperoleh dari internet atau arsip.

Kedua sumber data ini digunakan secara bersamaan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Data primer akan memberikan informasi utama dan detail yang didapatkan secara langsung dari lapangan, sementara data sekunder berfungsi untuk memperkaya konteks, memberikan landasan teoritis, serta mendukung dan menguatkan temuan dari data primer, sehingga menghasilkan analisis yang optimal.

1.10.7 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018 : 296) teknik pengumpulan data adalah proses yang menjadi pondasi dalam penelitian. Hal ini bertujuan mendapatkan data yang akurat. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data utama yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertukaran informasi atau ide yang melibatkan pertemuan dua orang melalui tanya jawab, sehingga dapat diinterpretasikan maknanya dalam topik tertentu. Wawancara memiliki tujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, pengetahuan, dan pandangan informan terkait pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan umum sebagai panduan, namun tetap memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan pertanyaan lebih lanjut secara spontan berdasarkan jawaban informan dari berbagai sudut pandang. Pendekatan ini memungkinkan penggalan informasi yang mendalam dan komprehensif, sekaligus menjaga fokus penelitian.

b. Observasi

Menurut Sugiyono (2014) dengan mengutip pendapat Marshall, melalui observasi, seorang peneliti dapat mempelajari perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data primer mengenai kondisi faktual dan konteks lapangan. Informasi yang diperoleh dari observasi juga akan menjadi modal awal dan bahan verifikasi saat melakukan wawancara. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah catatan lapangan dan pedoman observasi, didukung dengan dokumentasi visual (foto dan rekaman).

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk membuktikan keadaan yang nyata didalam sebuah penelitian. Dokumentasi akan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan pengembangan pariwisata Bukit Senja Diponegoro. Data ini berupa catatan, arsip, dan sumber-sumber visual yang sudah ada. Tujuannya adalah untuk melengkapi, memperkaya, dan menguatkan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi, serta menyediakan konteks historis dan faktual. Pada penelitian ini dokumentasi berupa foto ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara di Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang. Dokumentasi yang dipilih dalam penelitian ini juga dapat gambar - gambar yang berasal dari internet melalui website resmi sehingga tingkat kebenarannya dapat diujikan

1.10.8 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mencari data lapangan dengan berbagai persiapan yang telah direncanakan, yang selanjutnya disusun dan disajikan secara sistematis berdasarkan temuan lapangan. Selanjutnya, dipilih data yang penting dan akan dipelajari, dan dibuat kesimpulan (Rijali, 2018; Sugiyono, 2011). Analisis data dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti, yaitu mengenai implementasi Pengembangan Pariwisata Bukit Senja Diponegoro Kota Semarang. Berdasarkan pandangan Milles, Huberman, & Saldaña (2014), analisis data kualitatif dibagi kedalam tiga aktivitas, yaitu (1) Kondensasi Data (Data Condensation); (2) Penyajian Data (Display Data); (3) Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (Drawing and Verifying Conclusion).

1. Kondensasi Data

Menurut Milles, Huberman, & Saldaña (2014), kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data temuan lainnya. Kondensasi bertujuan untuk membuat data penelitian menjadi lebih kuat. Kondensasi data terjadi secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Kondensasi data juga dapat diartikan sebagai bentuk analisis data yang bertujuan untuk mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa hingga didapatkan kesimpulan. Kondensasi data dapat dilakukan melalui kegiatan penulisan ringkasan, pengkodean, pengembangan tema, pembuatan kategori, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk memilah data atau informasi yang tidak relevan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

2. Penyajian Data

Aktivitas analisis data yang kedua yaitu penyajian data (*Display Data*). Penyajian data adalah kumpulan data atau informasi terorganisir yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, lalu disusun dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data dapat berbentuk matriks, diagram, tabel, dan bagam. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif.

3. Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*).

Aktivitas analisis data yang ketiga atau yang terakhir yaitu Menggambarkan data dan Menarik Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*). Pada awalnya, kesimpulan sementara yang dilakukan oleh peneliti belum terlihat jelas maknanya. Namun, setelah adanya penambahan data hasil penelitian, makna yang terdapat dalam data-data tersebut akan terlihat lebih jelas. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dapat diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Peneliti harus mampu sampai pada tahap melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, makna yang akan diungkapkan merupakan data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Dari data tersebut, diperoleh kesimpulan yang belum jelas dan meragukan, sehingga perlu adanya verifikasi data. Verifikasi data dilakukan dengan cara melakukan kembali kondensasi data dan penyajian data (*display data*), sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang sesuai. Kesimpulan yang diambil bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah

yang telah dirumuskan sejak awal. Dalam penelitian ini, kesimpulan disajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan data hasil penelitian di lapangan

1.10.9 Kualitas Data

Menurut Sugiyono (2018 : 363) pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, sebuah data dapat tevrerifikasi kebenarannya apabila di data yang digunakan memiliki kesamaan dengan data yang dimiliki dan dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Pada penelitian ini menggunakan 4 cara uji keabsahan menurut Sugiyono (2010 : 458) yaitu uji kredibilitas, transferabillity (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan confirmability (objektivitas).

1. Uji kredibilitas data, dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang terkumpul dan interpretasi peneliti dapat dipercaya dan sesuai dengan realitas di lapangan. Hal ini dicapai melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data yang berbeda. Misalnya, informasi mengenai program pengembangan pariwisata akan diverifikasi melalui wawancara dengan informan kunci (seperti pengelola Pokdarwis, tokoh masyarakat, atau perwakilan Kelurahan Tembalang), observasi langsung terhadap aktivitas dan kondisi di Bukit Senja Diponegoro, serta analisis dokumen resmi terkait. Selain itu, peneliti akan menggunakan rekaman dan transkrip wawancara sebagai bukti otentik dari data yang telah dikumpulkan, serta dokumentasi

visual (foto/video) sebagai bukti pelaksanaan penelitian di objek yang telah dipilih

2. Uji Transferability (validitas eksternal), peneliti perlu memberikan uraian secara jelas dan rinci mengenai hasil penelitian yang dilakukan sehingga penelitian ini dapat di mengerti oleh orang lain yang membaca dan mudah diterapkan oleh penelitian lain.
3. Uji Dependability (reliabilitas), dilakukan untuk memastikan bahwa proses penelitian telah dilakukan secara konsisten dan dapat direplikasi, artinya jika penelitian ini diulang oleh peneliti lain dengan konteks yang sama, hasilnya akan konsisten. Menurut Sugiyono (2010: 469), pengujian dependability dilakukan melalui audit proses atau audit eksternal. Dalam penelitian ini, proses audit dilakukan melalui konsultasi dan pendampingan berkelanjutan dengan dosen pembimbing untuk mengevaluasi seluruh tahapan penelitian, mulai dari perancangan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Hal ini untuk meminimalkan kesalahan dan kekeliruan serta menjamin konsistensi penyajian data.
4. Uji Confirmability (Objektivitas), Uji confirmability bertujuan untuk memastikan bahwa temuan dan kesimpulan penelitian bersifat objektif dan tidak bias oleh pandangan pribadi atau prasangka peneliti. Uji ini erat kaitannya dengan uji dependability; jika proses penelitian dapat diaudit (dependability), maka objektivitas (confirmability) temuan juga dapat dinilai.

Dalam penelitian ini, confirmability dijamin catatan yang lengkap dan sistematis dari semua tahapan penelitian, meliputi: Transkrip wawancara dan Dokumentasi bersama informan yang dipilih dan surat keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.